

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terkait praktik politik uang pada film *Tepatilah Janji* menurut perspektif sosiologi sastra serta relevansinya dengan pembelajaran teks anekdot kelas X, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang yang ditampilkan dalam film tersebut memiliki beragam bentuk. Diantaranya berupa pemberian amplop, uang tunai, bantuan sembako, hadiah dan janji-janji. Dalam hal ini, praktik politik uang tidak hanya dilakukan oleh tokoh kandidat saja, akan tetapi pihak-pihak yang terlibat dalam ranah politik seperti tim sukses dan asisten juga turut mendistribusikan politik uang. Dari sisi perspektif sosiologi sastra Pierre Bourdieu, praktik politik dalam film *Tepatilah Janji* ini menunjukkan representasi dari praktik sosial yang telah membentuk suatu kebiasaan dalam ranah politik dengan melibatkan modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik untuk mempertahankan posisi kekuasaan.

Selain berupa tindakan, praktik politik uang juga ditampilkan dalam film ini melalui dialog dengan berbagai bentuk kebahasaan. Dalam hal ini, pertanyaan retorik muncul dalam dialog untuk menggiring dukungan warga dan sindiran untuk seorang politisi. Majas sindiran merujuk pada ironi yang digunakan untuk menyamakan praktik politik uang yang dilakukan oleh tokoh dan sinisme untuk menyindir langsung terkait modus-modus yang dilakukan tokoh politik. Sementara itu, kata kerja material juga digunakan untuk memperjelas tindakan tokoh dalam melakukan bentuk-bentuk praktik politik uang. Sehingga dalam hal ini, hasil dari penelitian praktik politik uang dalam film *Tepatilah Janji* dinilai relevan dengan pembelajaran teks anekdot kelas X. Relevansi

tersebut dapat dilihat dari adanya kesesuaian tema tentang kritik penyimpangan sosial dalam film tersebut dengan materi teks anekdot pada buku Bahasa Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi). Dalam buku ini memuat cerita teks anekdot tentang korupsi, sehingga hal ini relevan dengan pembahasan praktik politik uang karena sama-sama bentuk dari penyimpangan sosial dalam ranah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, bentuk kebahasaan yang ditemukan dalam dialog praktik politik uang dalam film juga sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam buku Bahasa Indonesia tersebut. Dengan demikian, film *Tepatilah Janji* tidak hanya sebagai hiburan, akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar kontekstual untuk membantu peserta didik dalam memahami teks anekdot, khususnya dalam pembelajaran kaidah kebahasaan untuk menyampaikan kritik sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

### **1. Bagi Guru Bahasa Indonesia**

Guru Bahasa Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan film *Tepatilah Janji* sebagai alternatif bahan ajar kontekstual tentang bentuk kritik penyimpangan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat dalam pembelajaran teks anekdot. Hal ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam memberikan pemahaman serta pengalaman belajar yang lebih mendalam dan kritis. Dengan demikian, peserta didik mampu berpikir kritis dengan berbagai permasalahan sosial di lingkungan sekitar.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji karya sastra dengan menggunakan perspekti sosiologi sastra Pierre

Bourdieu. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian dengan memperluas objek maupun fokus kajian yang berbeda. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan dari aspek pembelajaran dengan cara menguji langsung penggunaan film sebagai bahan ajar kontekstual Bahasa Indonesia.

### **3. Bagi Masyarakat Umum**

Masyarakat umum diharapkan dapat lebih bijak dan kritis dalam menyikapi praktik politik uang yang terjadi di lingkungan sekitar. Kritik sosial dalam film *Tepatilah Janji* ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi masyarakat agar lebih sadar bahwa bentuk penyimpangan sosial seperti praktik politik uang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia.